LOK.PPM..7

L O K A K A R Y A

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN EVALUASI KULIAH KERJA NYATA IPB

BOGOR, 21-22 DESEMBER 1988

HASIL EVALUASI
KULIAH KERJA NYATA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1987/1988

Oleh:

TIM KOORDINASI DAN TIM EVALUASI
KKN IPB 1987/1988

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

HASIL EVALUASI KKN IPB 1987/1988 [1]

Oleh

TIM KOORDINASI DAN TIM EVALUASI KKN IPB 1987/1988 [2]

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata ajaran yang bersifat intrakurikuler wajib bagi mahasiswa Strata Satu (S_1) Institut Pertanian Bogor. Perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dalam pembangunan memerlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan program KKN. Program KKN yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi dan relevan dengan pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat menuntut adanya peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan.

Usaha peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan KKN akan berhasil apabila sarana yang diperlukan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan telah mendukung.

Sarana yang diperlukan adalah materi kuliah pembekalan, dana dan waktu. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ialah komponen-komponen KKN IPB (Tim Koordinasi KKN IPB,

---

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian Pada Masyarakat dan Evaluasi KKN IPB, tanggal 21 - 22 Desember 1988 di LPPM IPB, Bogor

2) Sri Utami Kuntjoro, Maman Duldjaman, Yonny Koesmaryono, dan Surdiding Ruhendi.

Satgas Fakultas/Jurusan, pembimbing, mahasiswa), Pemerintah Daerah, Lembaga Profesi yang sesuai, serta masyarakat di lokasi KKN. Permasalahan yang dihadapi pada usaha peningkatan profesionalisme menyangkut hal-hal berikut:

1. Bagaimana penerapan materi bidang profesi oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN?
2. Apakah materi kuliah pembekalan telah relevan dengan program KKN di lapangan?
3. Bagaimana persepsi Pemerintah Daerah, Lembaga Profesi, dan masyarakat terhadap pelaksanaan program KKN yang mengarah kepada profesionalisme.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan KKN 1987/1988 secara menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu penyelenggaraan KKN dimasa mendatang.

Evaluasi ini lebih ditekankan kepada pelaksanaan dari program KKN. Informasi sebagai bahan evaluasi diperoleh dari panitia pelaksanaan KKN, pembimbing lapangan, tokoh masyarakat di lokasi KKN dan mahasiswa peserta KKN.

Dalam tahun 1987/1988 evaluasi dilakukan pada penyelenggaraan KKN yang berlokasi di 28 desa yang menyebar di 15 kecamatan atau 10 kabupaten/kodya di Jawa Barat dan DKI Jakarta, 11 Balai Penyuluhan Pertanian serta Perum Perhutani Jawa Tengah.

Sebagai bahan evaluasi digunakan keterangan-keterangan:

a) yang berkaitan dengan program KKN, yaitu materi kuliah pembekalan dan jenis kegiatan,

b) hal-hal yang berkenaan dengan organisasi, yaitu kepanitiaan, pembimbingan, partisipasi masyarakat serta dana dan lokasi, dan

c) persepsi dan tanggapan daerah penerima KKN.

Analisis yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah perhitungan frekuensi dan persentase bagi tingkat jawaban untuk setiap aspek kemudian ditetapkan skor dari tingkat jawaban tersebut. Skor tertimbang bagi setiap aspek dihitung dan merupakan jumlah dari hasil pembagian dari jumlah perkalian frekuensi dan skor dengan total responden setiap taraf jawaban pada setiap aspek. Skor tertimbang ini akan menggambarkan taraf persepsi responden terhadap aspek yang dievaluasi.

PELAKSANAAN KKN IPB 1987/1988

1. Dasar Hukum

Pengembangan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertitik tolak pada landasan pemikiran bahwa Institut Pertanian Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Program KKN IPB pada dasarnya masih mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan KKN yang dikeluarkan oleh Direktur P3M, Ditjen DIKTI DEPDIKBUD. Perkembangan pembangunan pada umumnya menuntut program

KKN IPB untuk penyesuaian. Dalam hal ini Program KKN yang sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi dan relevan dengan pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat menuntut adanya peningkatan Profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatannya.

Atas dasar semua itu maka IPB mengeluarkan suatu Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bentuk Surat Keputusan Rektor IPB Nomor: 081/Um/1987 tanggal 15 Oktober 1987. Dengan mengacu kepada dua hal di atas kemudian dibuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KKN IPB 1987/1988.

2. <u>Pengorganisasian</u>

a. *Status, Beban Kredit dan Peserta*

Status KKN IPB 1987/1988 adalah intrakurikuler wajib dengan beban kredit sebesar 3 hingga 4 SKS. Peserta KKN IPB adalah mahasiswa semester VIII dari tujuh Fakultas yang terdiri atas:

- Fakultas Pertanian - 491
- Fakultas Kedokteran Hewan - 104
- Fakultas Perikanan - 193
- Fakultas Peternakan - 134
- Fakultas Kehutanan - 178
- Fakultas Teknologi Pertanian - 244
- Fakultas Matematika dan IPA - 125

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1469 orang.

b. *Kepanitiaan*

Organisasi Pelaksanaan KKN IPB terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu:

1. Tim Koordinasi KKN IPB yang dibentuk oleh Ketua LPPM IPB dan disyahkan melalui SK Rektor Nomor: 086/C/1987 tanggal 31 Oktober 1987. Tim Koordinasi merupakan Tim Pelaksana KKN tingkat IPB.
2. Satuan Tugas KKN Fakultas/Jurusan yang dibentuk oleh masing-masing Fakultas dan Jurusan disyahkan melalui SK Rektor Nomor: 082/C/1987 tanggal 23 Juli 1987. Satgas ini merupakan pelaksana KKN di tingkat Fakultas/Jurusan.
3. Pembimbing yang dibentuk oleh masing-masing jurusan dan disyahkan melalui SK Ketua LPPM IPB Nomor: 500/PT39.H11/C/1988. Pembimbing ini merupakan penunjang pelaksanaan KKN dan terdiri atas Pembimbing Lapang dan Pembimbing Akademik.
4. Mahasiswa merupakan unsur pelaksana program KKN di lokasi yang telah ditentukan Satgas masing-masing.
5. Koordinator Wilayah (Korwil) yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi dan bertugas mengkoordinasikan Pelaksanaan KKN di suatu wilayah.

c. *Pembimbing*

Sesuai dengan kepanitiaan maka Pembimbing dan proses pembimbingan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan Program KKN sejak dipembekalan, pelaksanaan di lapang hingga penulisan laporan.

Pada umumnya Pembimbing KKN IPB dibagi menjadi dua yaitu Pembimbing Lapang dan Pembimbing Akademik.

Pembimbing Lapang umumnya bertindak sekaligus sebagai Satgas Jurusan. Tugas Pembimbing Lapang adalah pengasuhan dan pengawasan (supervisi) kepada mahasiswa sebelum, selama dan sesudah melakukan KKN. Pembimbing Akademik yang dapat dirangkap oleh Pembimbing Lapang bertugas menentukan nilai keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan program KKN (dalam bentuk laporan KKN). Nilai keberhasilan tersebut kemudian disampaikan kepada Satgas Fakultas/Jurusan.

d. *Peran Pemerintah Daerah dan Dinas Sektoral*

Dalam pelaksanaan KKN IPB 1987/1988 peran Pemerintah Daerah maupun Dinas Sektoral cukup positif terutama dalam hal izin lokasi dan pengarahan di lapang bagi mahasiswa. Pada beberapa Fakultas/Jurusan bahkan pelaksanaan KKN nya berdasarkan kerjasama dengan Departemen/Dinas Sektoral di daerah. Hal ini dinilai cukup positif dalam kaitan dengan peningkatan profesionalisme dalam program KKN.

3. <u>Program</u>

Program KKN IPB 1987/1988 pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Fakultas/Jurusan dalam rangka peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatannya. Oleh karenanya program KKN IPB 1987/1988 umumnya merupakan Kegiatan Profesi Bidang Keahlian (KPBK). Namun demikian sepanjang memungkinkan

maka KPBK tersebut dapat dilengkapi dengan Kegiatan Profesi Interdisipliner (KPI) dan Kegiatan Umum (KU) yang secara keseluruhan alokasinya kurang lebih sebagai berikut:

a. Kegiatan Profesi Bidang Keahlian (KPBK) : 80 % - 100 %
b. Kegiatan Profesi Interdisipliner (KPI) : 0 % - 20 %
c. Kegiatan Umum (KU) : 0 % - 10 %

4. <u>Pelaksanaan</u>

a. *Tahapan*

Pelaksanaan kegiatan KKN IPB 1987/1988 meliputi tahapan diurut ke bawah.

1) persiapan (penyusunan kepanitiaan)
2) perencanaan (penyusunan program oleh Satgas, pendaftaran mahasiswa, penentukan lokasi, pengurusan izin dan lain-lain). 3) pembekalan oleh Tim Koordinasi dan Satgas Fakultas/Jurusan.
4) kegiatan lapang dan pembimbingan
5) penulisan laporan
6) penilaian KKN
7) evaluasi hasil pelaksanaan KKN IPB 1987/1988

b. *Waktu Pelaksanaan*

Waktu Pelaksanaan KKN IPB 1987/1988 dibagi menjadi dua tahap yaitu gelombang I (Maret - Mei 1988) yang terdiri atas Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas MIPA dan gelombang II

(Juni - Agustus 1988) yang terdiri atas Fakultas Pertanian, FKH, Fakultas Peternakan dan Fakultas MIPA Jurusan Statistik.

Adanya dua gelombang pemberangkatan ini tidak bisa dihindarkan karena perbedaan pelaksanaan akademik di masing-masing Fakultas/Jurusan.

c. *Lokasi Kegiatan*

Lokasi kegiatan sangat berguna sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa di Fakultas atau Jurusan masing-masing. Lokasi KKN IPB 1987/1988 terdiri atas Wilayah Administratif Desa atau Kecamatan, Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan, Wilayah Perkebunan, Unit Perkantoran dan Unit Produksi (Pabrik).

5. <u>Pembiayaan</u>

Pembiayaan KKN IPB 1987/1988 berasal dari berbagai sumber antara lain:

a. Dana partisipasi mahasiswa yang digunakan untuk keperluan Tim Koordinasi maupun Satgas
b. Dana Bantuan Pemda Tingkat I Jawa Barat khusus untuk lokasi KKN di Jawa Barat.
c. Dana SPP/DPP

Sumber dana lain yang berasal dari kerjasama Fakultas/Jurusan dengan Instansi Sektoral/Pemerintah Daerah dikelola langsung oleh Satgas Fakultas/Jurusan.

EVALUASI KKN IPB 1987/1988

Pada umumnya KKN IPB 1987/1988 telah berjalan lancar, baik pada gelombang pertama, maupun gelombang kedua. Beberapa masalah dan kesulitan dapat diselesaikan, meskipun memerlukan perbaikan pada masa yang akan datang.

Sebelum berangkat ke lapangan, hampir seluruh mahasiswa mengikuti kuliah pembekalan. Kuliah dan sistem pengajaran yang diberikan oleh dosen pembekalan dianggap cukup, walaupun masih perlu pematangan kembali dan belum merupakan teknologi tepat guna sesuai dengan yang dikehendaki mahasiswa. Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kuliah pembekalan masih perlu dirangsang, karena yang hadir 80 % keatas hanya separuhnya.

Tim pelaksana KKN sebagai penyelenggara masih perlu meningkatkan informasi tentang KKN kedalam maupun keluar. Koordinasi Tim Pelaksana perlu ditingkatkan terutama Korwil di lapangan sebagai pemandu atau penghubung antara IPB dengan Pemda belum jelas dengan apa yang diperlukan. Informasi yang diterima tokoh masyarakat waktunya terlalu sempit sehingga kurang cukup waktu untuk mempersiapkannya.

Informasi tentang calon lokasi KKN yang diterima mahasiswa pada umumnya masih kurang, walaupun ada mahasiswa yang mendatangi calon-calon lokasi KKN sebelum pelaksanaan KKN. Kekurangan informasi ini dirasakan juga oleh dosen pembimbing dan terlebih-lebih lagi dosen pembekalan.

Kegiatan mahasiswa di lapangan dibagi kedalam tiga kegiatan yaitu kegiatan keprofesian, kegiatan profesi interdisipliner dan kegiatan umum. Pada umumnya mahasiswa dalam melaksanakan program lebih banyak tercurah pada kegiatan keprofesiannya walaupun masih jauh daripada yang diharapkan. Kegiatan pendidikan penyuluhan yang dilakukan oleh 89% mahasiswa dan percontohan oleh 54 % mahasiswa berisikan materi profesi, sedangkan kegiatan pembinaan/pengkaderan dan gotong royong lebih berisi materi umum kemasyarakatan. Kegiatan lain yang dilakukan oleh sebagian kecil mahasiswa adalah kegiatan kepemudaan dan kesehatan/gizi. Didalam melaksanakan program kegiatan KKN, 47 % Jurusan atau Fakultas sama-sama melakukan kegiatan KKN bersamaan dengan praktek lapangnya. Kegiatan PL 77 % dilakukan di lokasi KKN. Pengaturan waktu mahasiswa didalam melaksanakan kegiatan lapangan antara kegiatan KKN dengan kegiatan PL nya tidak ada kesulitan. Materi pembekalan erat kaitannya dengan kebutuhan mahasiswa dalam melaksanakan program. Materi pembekalan umum masih dianggap kurang relevan sedang materi keprofesian cukup relevan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Program yang telah disusun mahasiswa umumnya tidak dapat dilaksanakan semuanya. Mahasiswa yang bisa menyelesaikan program seluruhnya 15 % dan yang lebih setengahnya 69 %. Kendalanya antara lain disebabkan dana yang tersedia 42 %, dukungan masyarakat 19 % kekurangan waktu 16 %, duku-

ngan pemerintah setempat 13 % dan sebab lain 11 %. Program-program yang dibuat atau dilaksanakan mahasiswa KKN umumnya banyak membantu masyarakat khususnya di lokasi KKN, disamping menunjang atau meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswanya sendiri.

Pembimbingan kepada mahasiswa dilakukan pada masa persiapan dan masa pelaksanaannya. Kehadiran dosen pembimbing di lapangan dirasakan mahasiswa masih kurang terutama waktu untuk tatap muka. Sedangkan konsultasi mahasiswa dengan dosen pembimbing di lapangan dirasakan sangat bermanfaat.

Persepsi pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi KKN terhadap pelaksanaan program KKN cukup baik. Di lain pihak, dukungan serta keterlibatan perusahaan masih kurang, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan profesi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya KKN IPB 1987/1988 telah berjalan lancar, baik pada gelombang pertama, maupun gelombang kedua. Beberapa masalah dan kesulitan dapat diselesaikan, meskipun memerlukan perbaikan pada masa yang akan datang.
2. Program dan jenis kegiatan mahasiswa dalam KKN disusun oleh mahasiswa dengan pertimbangan aspek profesi dan kebutuhan masyarakat di lokasi KKN. Hal ini dicerminkan oleh relevan program KKN dan kemampuan mahasiswa

mengembangkan profesi serta pemecahan masalah di lokasi KKN.

3. Jenis kegiatan mahasiswa selama KKN yang dilaksanakan dengan pendidikan/penyuluhan dan percontohan berisi materi profesi, sedangkan pembinaan/pengkaderan dan gotong royong lebih berisi materi umum kemasyarakatan. Jenis kegiatan lain yang dilaksanakan adalah kegiataan berkenaan dengan kesehatan/gizi dan kepemudaan.
4. Mahasiswa peserta KKN merasa bahwa materi pembekalan profesi sudah cukup relevan, sedangkan materi pembekalan umum perlu ditingkatkan mutunya.
5. Komunikasi antara Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebelum pelaksanaan cukup baik. Dilain pihak, komunikasi antara dosen Pembimbing dengan Tim Pelaksana dirasakan kurang.
6. Pembimbing yang dirasakan yang bermanfaat bagi mahasiswa masih rendah intensitasnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana dan waktu dari dosen pembimbing.
7. Persepsi pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi KKN cukup baik. Dilain pihak ketelibatan perusahaan tempat KKN masih kurang, terutama dengan pelaksanaan program dan kegitan profesi.
8. Panitia pelaksana tidak terhindar dari kesulitan, terutama dari segi ketersediaan dana dan waktu serta disiplin para anggotanya.

B. S A R A N

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi penyelenggaraan KKN IPB dimasa yang akan datang, antara lain adalah:

1. Untuk dapat terlaksananya program/kegiatan KKN perlu dukungan dana dari berbagai pihak. Program KKN yang sesuai dengan kebutuhan IPB dan relevan dengan program pembangunan daerah serta bermanfaat bagi masyarakat seyogyanya tercantum dalam daftar isian proyek pembangunan IPB dan Pemda serta swadaya masyarakat.
2. Perlu pemahaman secara lebih luas tentang makna KKN Profesi di masing-masing Satgas Fakultas/Jurusan. Hal ini penting untuk menghindari kerancuan antara "Praktek Magang" dengan "Praktek Kuliah Kerja Nyata".
3. Perlu peningkatan peran Koordinasi di tingkat institusi mengingat sangat beragamnya program KKN antar Fakultas/ Jurusan sehingga dimungkinkan seluas-luasnya pelaksanaan KKN profesi yang interdipliner. Koordinasi tersebut dapat berjalan apabila perencanaan program dan lokasi KKN dapat dipersiapkan secara baik pada waktu yang lebih awal oleh tiap Satgas Fakultas/ Jurusan.
4. Pemahaman tentang KKN Profesi seyogyanya dapat disebarluaskan kepada Pemerintah tempat KKN, dengan demikian akan meningkatkan kerjasama yang lebih baik,

khususnya dalam hal koordinasi perizinan dan pelaksana masing-masing program KKN Satgas Fakultas/Jurusan.

5. Perlu peningkatan kualitas kuliah pembekalan menjadi lebih bersifat pelatihan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan program dan kegiatan KKN.
6. Panitia Pelaksana (termasuk pembimbing) perlu menempatkan KKN sebagai bagian dari jadwal kerja mereka sejajar dengan tugas tri darma lainnya
7. Konsultasi dan pendekatan Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN IPB perlu lebih diintensifkan untuk menumbuhkan perasaan memiliki program KKN oleh semua pihak, terutama dalam menanggulangi masalah dana dan lokasi KKN.

-----oOo-----